



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jln. H. Agus Salim

Fax (0756) 210005 PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 950/ 29 /KPTS/BPKPAD-PS/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 950/01/KPTS/BPKPAD-PS/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang
- a. Untuk tertibnya pengelolaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/228/Kpts/BPT/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/33/Kpts/BPT/2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Bahwa penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah;

6. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : I. Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan yang dipimpinnya dengan baik dan bertanggung jawab atas fisik dan keuangannya;
2. Mematuhi dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku;
3. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisisen, efektif dan ekonomis dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggung jawab;
4. Mengetahui secara pasti kondisi awal kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi lapangan serta mengantisipasi sedini mungkin terhadap permasalahan yang timbul dilapangan;
6. Wajib membuat laporan kemajuan pekerjaan dan keuangan serta menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan dengan tembusan :
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Bagian Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan.
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

II. Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang terkait dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah :

1. Menyiapkan Dokumen dalam rangka Pelaksanaan Anggaran atas beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan.
2. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan kepada PA/KPA.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Penyediaan Anggaran (DPA) kegiatan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal 13 Maret 2023

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KEPALA

HELLEN HASMEITA SARI, SE.AK, M.Ec.Dev

NIP. 19780528 200501 2 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kabid dilingkungan BPKPAD Kab. Pesisir Selatan
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
5. Pertinggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 950/ 24 /Kpts/BPKPAD-PS/2023

TANGGAL : 13 MARET 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 NOMOR 950/01/Kpts/BPKPAD-PS/2023 TANGGAL 3 JANUARI 2023 TENTANG PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA
 MENJADI PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
 DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA	KET
1	2	3	4	5	6
I	SEKRETARIAT				
1.	ASWENRIZAL, S.Sos 19760116 200801 1 007	Penata Tk.I / III b	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA	KET
2.	RAHAYU KURNIA PUTRI, SE 19871116 200604 2 002	Penata / III c	Perencana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3. Fasilitasi Kunjungan Tamu 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
3.	RANI MEIRINA. S, SE 19850524 200501 2 002	Penata Muda / III a	Analisis Sistem Informasi Perbendaharaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
4.	EFRIANTO 19840712 200701 1 003	Pengatur Tk. I / II d	Pengadministrasi Umum	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
II	ANGGARAN				
1.	WIDYANTORO, S.Pi 19811021 200501 2 003	Penata Tk. I / III d	Kasubbid Perencanaan dan Kebijakan Anggaran	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
2.	RENI DAHLIA, SE 19730130 200701 2 004	Penata Tk. I / III d	Kasubbid Penyusunan Anggaran	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA	KET
				2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
				3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
				4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
III	PERBENDAHARAAN				
1.	GUSTINI, SE.Ak, MM 19760805 200012 2 002	Pembina / IV a	Kasubbid Perbendaharaan dan Verifikasi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
				1. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
				1. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	
2.	FITRI HANDAYANI, A.Md 19810803 200501 2 006	Penata / III c	Kasubbid Pengelolaan Kas Umum Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
				1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
				2. Koordinasi , Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
				1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
3.	LUSIANA, S.Kom, MM 19810406 200902 2 005	Penata Tk. I / III d	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
				1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
IV	AKUNTANSI DAN BINA KEUANGAN				
1.	ELZA NILAWATI, SE 19831227 2009025 2 005	Penata / III c	Kasubbid Akuntansi dan Pembukuan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
				1. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
				2. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
2.	WETRI MULYADEVITA, A.Md 19800708 200902 2 003	Penata Muda Tk. I / III b	Kasubbid Bina Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
				1. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA	KET
				2. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
				3. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota	
3.	RAHMI HAMDA SARI, S.St 19850921 200501 2 002	Penata / III c	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
				1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
V	BARANG MILIK DAERAH				
1.	ROSZA LESTARI, SE 19780920 200701 2 007	Penata Tk. I / III d	Kasubbid Perencanaan dan Pengadaan BMD	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				1. Penyusunan Standar Harga	
				2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
				3. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
2.	FERI CANDRA, S.Kom 19840212 200604 1 004	Penata / III c	Kasubbid Penatausahaan dan Pengendalian BMD	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				1. Penatausahaan Barang Milik Daerah	
				2. Inventarisasi Barang Milik Daerah	
				3. Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
				4. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
3.	MUHAMMAD ZAKI. E.MM, SE 19821030 201502 1 002	Penata Muda Tk. I / III b	Kasubbid Pengamanan dan Pemanfaatan BMD	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				1. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				2. Pengamanan Barang Milik Daerah	
VI	PERENCANAAN PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH				
1.	MIRA HERSANTI, SE, MM 19790727 200902 2 001	Penata Tk. I / III d	Kasubbid Perencanaan dan Kebijakan Pendapatan Daerah	Pogram Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
				2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
2.	APRINI, SE 19740325 200701 2 006	Penata Muda Tk. I / III b	Kasubbid Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan	Pogram Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				1. Pembinaan dan Pengawasan Pengeluaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA	KET
3.	MELI ETRI YENI, SE 19750718 200701 2 006	Penata / III c	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Pogram Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	
VII PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
1.	ZULKIFLI, SH 19771212 200003 1 001	Penata Tk. I / III d	Kasubbid PBB dan PBHTB	Pogram Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah 2. Penagihan Pajak Daerah	
2.	ANDREAS ADITYA, SS 19861206 201002 1 001	Penata / III c	Kasubbid Pendapatan Daerah dan Lainnya	Pogram Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah 2. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
3.	NOVIARDI, SE 19691107 200604 1 003	Penata Tk. I / III d	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Pogram Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	


 Painan, 13 Maret 2023
 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN
 DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak. M.Ec. Dev
 NIP. 19780528 200501 2 004